

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA ERA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Akhsanul Huda

STIT Misbahul Ulum Gumawang, Jl. Irigasi Desa Tanah Merah Kec. Belitang
Madang Raya Kabupaten OKU Timur Prov. Sumatera-Selatan
Email: akhsanulhuda29@gmail.com

Abstrak

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa sekarang (reformasi). Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, Madrasah, Surau, dan semacamnya mempunyai andil besar terhadap proses kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajah. Lembaga-lembaga tersebut menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap penjajah. Kenyataannya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sejarah pendidikan islam di Indonesia mencakup fakta atau kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan pendidikan islam di Indonesia, baik formal maupun non formal.

Pada masa demokrasi liberal terjadi perdebatan ideologi maka dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi diambil beberapa keputusan salah satunya adalah dengan mendirikan Kementerian Agama.

Kemudian pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden Pada 1959 maka berakhirilah masa Demokrasi liberal, berubah menjadi Demokrasi terpimpin Soekarno. Di masa Demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis), suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasionalis “sekular”, Islam dan Komunis. Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga unsur politik ini. Maka dari itu, kebijakan yang terjadi pada masa demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin dijabarkan dalam artikel ini.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan Agama Islam, Demokrasi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga masa sekarang (reformasi). Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, Madrasah, Surau, dan semacamnya mempunyai andil besar terhadap proses kemerdekaan bangsa dari belenggu penjajah. Lembaga-lembaga tersebut menjadi tempat dan simbol perlawanan terhadap penjajah. Kenyataannya bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sejarah pendidikan islam di Indonesia mencakup fakta atau kejadian yang berhubungan dengan pertumbuhan pendidikan islam di Indonesia, baik formal maupun non formal.

Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia adalah suatu kenyataan yang sudah berlangsung sangat panjang dan sudah memasyarakat. Pada masa penjajahan Belanda dan penduduk Jepang, pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat sendiri dengan mendirikan pesantren, sekolah dan tempat latihan-latihan lain. Setelah merdeka, pendidikan Islam dengan cirri khasnya madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah Republik di Indonesia.

Pemerintahan pada masa orde lama diberi tugas oleh UUD 1945 untuk mengusahakan agar terbentuknya suatu system pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Oleh karena itu, pastilah sejarah mencatat bagaimana pemerintah orde lama memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Masa seteleh diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, bisa kita sebut sebagai Rezim Orde lama , dimana Soekarno bertindak sebagai kepala negara.

Dalam hal ini kita perlu membahas tentang Masa Orde Lama terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang kebijakan Pendidikan Agama Islam pada Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, hal itu dikarenakan dua masa demokrasi tersebut merupakan bagian dalam Masa Orde lama.

B. PEMBAHASAN

1. Masa Orde Lama

Sejak Indonesia merdeka dan membentuk NKRI, sistem pendidikan mulai diatur oleh negara sejak kemerdekaan tahun 1945. Orde lama memfokuskan pendidikan sebagai upaya dalam pembentukan karakter bangsa. Inilah orde dimana semua orang merasa sejajar, tanpa dibedakan warna kulit, keturunan, agama dan sebagainya. Begitu juga dalam dunia pendidikan, orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Dengan demikian Menteri PP dan K pertama (Ki Hajar Dewantara) mengeluarkan instruksi umum yang memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk :

1. Mengibarkan Sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah.
2. Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Menghentikan pengibaran bendera jepang dan menghapus nyanyian Kimiyago (lagu kebangsaan jepang).
4. Menghapus pelajaran bahasa jepang, serta upacara yang berasal dari bala tentara jepang.
5. Memberi semangat kebiasaan kepada semua murid.²

Atas usul badan pekerja KNIP, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mr. Soewandi) membuat surat keputusan Nomor 104/Bhg o tertanggal 1 Maret 1946, untuk membentuk panitia penyelidik pengajaran dibawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara dan Soegarda Poerbaka Watji sebagai penulis. Tugas yang diberikan kepada panitia ini antara lain :

1. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah.

¹.<http://haanadza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-islam-pada-masa-orde-lama.html>

².Mustafa dan abdulloh, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.130.

2. Menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat.
3. Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas.

Salah satu hasil dari panitia tersebut adalah mengenai perumusan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional pada masa tersebut penekanannya adalah pada penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional, sehingga dengan semangat itu kemerdekaan dapat dipertahankan dan diisi. Kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Republik Indonesia dalam tahun 1946 mengeluarkan suatu pedoman bagi guru-guru yang memuat sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan pendidikan di negara Republik Indonesia yang pada dasarnya berintisarkan Pancasila.

Pada bulan Desember 1949 Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada tanggal 5 April 1950 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia yang asusila dengan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Ini berarti bahwa setiap sistem persekolahan pada waktu itu harus dapat menanamkan dan mengembangkan sifat-sifat demokratis pada anak didiknya misalnya : di dalam kampus muncul kebebasan akademis yang luar biasa ditandai dengan fragmentasi politik yang begitu hebat di kalangan mahasiswa-mahasiswa bebas berorganisasi sesuai dengan pilihannya.³

³.Drs. Ari H Gunawan, *Kebijakan-kebijakan pendidikan*, (Jakarta : Rineka cipta, 1995), h.36

Sistem persekolahan pada masa orde lama hanya mengenal 3 tingkat :

1. Pendidikan rendah, yang terdiri dari taman kanak-kanak (1 tahun) dan sekolah dasar (6 tahun).
2. Pendidikan menengah yang terdiri dari sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dengan masa belajar untuk masing-masing terdiri atas sekolah umum dan sekolah kejuruan.
3. Pendidikan tinggi selama kurun waktu 1945-1950 berkembang pesat dan terbuka lebar bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat, tetapi karena masa perjuangan maka perkuliahan kerap kali disela dengan perjuangan ke garis depan. Pendidikan tinggi yang ada berbentuk universitas atau perguruan tinggi dan akademi.

Para pengajar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya walaupun serba terbatas. Dengan segala keterbatasan itu memupuk pemimpin-pemimpin nasional yang dapat mengatasi masa panca roba seperti rongrongan terhadap NKRI.

Kebijakan yang diambil orde lama dalam bidang pendidikan tinggi yaitu mendirikan universitas di setiap provinsi. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada waktu itu pendidikan tinggi yang bermutu terdapat di pulau Jawa seperti UI, IPB, ITB, Gajah Mada, dan UNAIR, sedangkan di provinsi-provinsi karena kurangnya persiapan dosen dan keterbatasan sarana dan prasarana mengakibatkan kemerosotan mutu pendidikan tinggi mulai terjadi.

Orde lama Presiden Soekarno mencanangkan program pendidikan pemberantasan buta huruf, karena selama dijajah Belanda, rakyat tidak bisa menikmati pendidikan sehingga mayoritas buta huruf.⁴

⁴.Anam, S, *sekolah dasar, pergulatan mengejar ketertinggalan*, (Solo: Wijatri), h.113-148.

Pada masa Orde Lama ini terdapat dua fase besar yang akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya, yaitu :

1) Masa Demokrasi Liberal

a. Sistem Persekolahan

Sejak Agustus 1950 penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran menggunakan Undang-Undang pokok pendidikan dan pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 Republik Indonesia. Susunan sekolah tersebut adalah sekolah rakyat 6 tahun, sekolah lanjutan tingkat pertama 3 tahun, dan sekolah lanjutan tingkat atas 3 tahun. Pada tahun 1954 didirikan lembaga pendidikan guru bertingkat universitas yang pertama yaitu Pendidikan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung.

b. Kesempatan Belajar

Undang-Undang pendidikan tahun 1950 dan 1959 Pasal 17 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat yang ditetapkan unit pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu”.

Di samping itu, pasal 21 ayat 1 menyatakan pula bahwa: “Pemerintah dan bangsa Indonesia menerima ko-edukasi pendidikan untuk laki-laki dan perempuan bersama-sama”.

Dari Undang-Undang tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa:

- a) Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat, seperti anak petani, pedagang, pegawai negeri, pengusaha, anggota ABRI untuk mendapatkan pendidikan mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
- b) Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat untuk mencapai tingkat yang tertinggi, asalkan memenuhi syarat.

- c) Pemerintah memberikan kesempatan belajar bagi setiap golongan masyarakat tanpa membedakan apakah anak laki-laki atau perempuan.

Pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama “Rencana Pelajaran Terurai 1952”. Kurikulum ini mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP, kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja.

c. Islam Pada Masa Demokrasi Liberal

Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menghadapi sebuah pertanyaan besar, apakah pemerintahan akan dijalankan berlandaskan ajaran agama Islam ataukah secara sekuler? Hal ini dipicu oleh tindakan dimentahkannya kembali Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam merosot dan dianggap tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang merupakan mayoritas. Misalnya saja, dalam KNIP dari 137 anggotanya, umat Islam hanya diwakili oleh 20 orang, di BPKNIP yang beranggotakan 15 orang hanya 2 orang tokoh Islam yang dilibatkan. Belum lagi dalam kabinet, hanya Menteri Pekerjaan umum dan Menteri Negara yang dipercayakan kepada tokoh Islam, padahal Umat Islam mencapai 90% di Indonesia.

Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebatan ideologi diambil beberapa keputusan, salah satunya adalah dengan mendirikan Kementerian Agama.

Pembentukan Kementerian Agama ini tidak lepas dari keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya pada tanggal 25-26 Agustus 1945 yang membahas agar dalam Indonesia yang merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementerian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab kementerian Pendidikan. Kementerian Agama resmi berdiri 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama M. Rasyidi yang diangkat pada 12 Maret 1946.

Awalnya kementerian ini terdiri dari tiga seksi, kemudian menjadi empat seksi masing-masing untuk kaum Muslimin, Protestan, Katolik Roma, dan Hindu-Budha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari lima Direktorat Jenderal (Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Protestan dan Ditjen Bimbingan Hindu-Budha) juga dibantu oleh Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Agama serta Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Pegawai. Tujuan dan Fungsi Kementerian Agama (dirumuskan pada 1967) :

- a) Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama.
- b) Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan Agama dan keagamaan.
- c) Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
- d) Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.
- e) Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.

- f) Mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.

Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya. Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat No.X pada 3 November 1945 tentang diperbolehkannya pendirian partai-partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali, Masyumi (majlis Syuro Muslimin Indonesia), Partai Sosialis (dengan falsafah hidup Marxis) dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang Nasionalis Sekuler. Setelah pemilu tahun 1955, banyak terjadi dialog ideologi secara terbuka dan memunculkan tiga alternatif dasar negara, yaitu: Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi.

Pada kurun waktu ini, umat Islam begitu kompak, buktinya dengan ditandatanganinya Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7-8 November di Yogyakarta. Selain itu, dalam menghadapi pasukan Belanda yang kembali setelah diboncengi NICA, para Kiyai dan Tokoh Islam mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan fardhu a'in, sehingga munculah barisan Sabilillah dan Hizbullah. Hasil terpenting dari kongres ini adalah terbentuknya suatu wadah perjuangan politik Indonesia.

Disisi lain, Syahrir yang merupakan pimpinan KNIP mendesak untuk dilakukannya rekonstruksi KNIP melalui petisi 50 negara KNIP, tujuannya agar kabinet tak didominasi oleh kolaborator (Jepang dan Belanda). Desakan ini kemudian dikabulkan oleh Presiden, dengan demikian KNIP mendapatkan Hak legislatif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, Syahrir dan kelompoknya juga mendesak untuk dilakukannya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Republik, kabinet bukan bertanggung jawab kepada Presiden, tapi kepada KNIP, dengan

begitu sistem pemerintahan bukan lagi presidential, tetapi Parlementer. Masyumi kurang sejalan dengan usulan Syahrir karena pada kenyatannya Syahrir sangat erat berhubungan dengan Jepang dan ekspensor Belanda.

Presiden pada waktu itu setuju dengan usulan Syahrir, bahkan kemudian Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pada 14 November 1945. Hasilnya, dari 14 anggota parlemen, hanya satu orang yang dapat dianggap mewakili tokoh Umat Islam, yaitu H. Rasyidi yang kemudian bertamabah pada 3 Januari 1946 dengan diangkatnya M. Natsir sebagai Menteri Penerangan. Sejak saat itu, Masyumi menjadi oposisi dan baru pada Kabinet Amir Syarfudin Masyumi masuk sebagai partai koalisi.

Selanjutnya dalam kabinet Hatta, ada empat masalah krusial yang harus diselesaikan, yaitu gerakan Darul Islam, konsekuensi Perjanjian Renville, penyerahan kedaulatan melalui KMB dan penanganan pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun. Dalam kurun waktu 1950-1955 peranan parpol Islam mengalami pasang surut.

Setelah pemilu 1955 dimana terpilihnya Kabinet Ali Sostroamidjoyo II yang merupakan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Kabinet ini kemudian jatuh pada 1957 karena ingin ikut serta dalam kekuasaan pemerintahan, selain itu Perti dan Masyumi pun keluar dari kabinet karena kurang setuju dengan kebijakan dalam menangani krisis di beberapa daerah. Pemerintahan pun diambil alih oleh Presiden. Pada 1959, dikeluarkanlah Dekrit Presiden tentang pembubaran konstituante dan sekaligus pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar tahun 1945 dan usaha-usaha partai Islam untuk menegakan Islam sebagai ideologi negara dalam konstituante pun mengalami jalan buntu. Dekrit ini sebenarnya ingin mengambil jalan tengah untuk menyatakan bahwa Piagam Jakarta terkandung dalam UUD 1945, namun tampaknya kemudian

menjadi awal bergantinya sistem demokrasi Liberal berganti menjadi demokrasi terpimpin.

2) Masa Demokrasi Terpimpin

a. Kebijakan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam keputusan presiden nomor 145 Tahun 1965 adalah sebagai berikut :

Tujuan pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan pra sekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang asusila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.

Kebijakan pendidikan pada waktu itu yaitu, “*Sapta Usaha Tama Dan Panca Wardhana*” tertuang dalam instruksi Menteri PP&K Nomor 1 Tahun 1959. *Sapta Usaha Tama* berisi :

- a) Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementerian PP&K
- b) Menggiatkan kesenian dan olahraga
- c) Mengharuskan “usaha halaman”
- d) Mengharuskan penabungan
- e) Mewajibkan usaha-usaha koperasi
- f) Mengadakan “kelas masyarakat”
- g) Membentuk “*regu kerja*” di kalangan SLA dan Universitas

Sementara *Panca Wardhana* berisikan segi-segi sebagai berikut :

- a) Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internal dan keagamaan (moral)
- b) Perkembangan intelegensi (kecerdasan)
- c) Perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuana dan keindahan lahir batin
- d) Perkembangan keprigelan (kerajinan) tangan
- e) Perkembangan jasmani

Konsep pembelajaran pada tahun 1964 mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan (problem solving). Rencana pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karya dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah panca wardhana.

Pada saat itu pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Cara belajar dijalankan dengan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Selain itu pemerintah menerapkan hari Sabtu sebagai hari krida, maksudnya, pada hari Sabtu siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat siswa. Kurikulum 1964 adalah alat untuk membentuk manusia Pancasila yang sosialis Indonesia, dengan sifat-sifat seperti pada ketetapan MPKS No. 11 Tahun 1960.

Penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum 1964 mengubah penilaian di rapor bagi kelas I dan II yang asalnya berupa skor 10-100 menjadi huruf A, B, C, dan D. Sedangkan bagi kelas III hingga VI tetap menggunakan skor 10-100.

b. Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Pada 1959, berakhirlah masa Demokrasi liberal, berubah menjadi Demokrasi terpimpin Soekarno. Timbulnya pemusatan kekuasaan mencuatkan konsekuensi yang variatif terhadap partai-partai Islam. Dengan beberapa Keppres, sejumlah Papol dikebiri karena dianggap menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Beberapa tindakan seperti kristalisasi NU dan PSII, (namun Perti yang dianggap wakil kelompok NASAKOM dibiarkan tetap ada), sedangkan yang terjadi pada Masyumi, beberapa pemimpinnya yang

dianggap pendukung sejati negara Islam dan oposisi yang tak berkesudahan dipenjarakan dan Masyumi di bubarkan pada 1960.

Partai Islam yang tersisa (NU, Perti dll) melakukan penyesuaian diri dengan keinginan Soekarno yang didukung oleh ABRI dan PKI. Beberapa bentuk penyesuaiannya seperti pemberian gelar *Waly Al-Amr al-Dahruri bi al-Syaukah* kepada Soekarno oleh NU, dan *Doktor Honoris Causa* dari IAIN dengan promotor K.H. Saifudin Zuhri (salah satu pimpinan NU). NU mendukung beberapa manipulasi Soekarno, sehingga pasca dibubarkannya Masyumi, NU menjadi Partai Islam terbesar pada waktu itu. Beberapa pihak menganggap NU sebagai partai oportunis karena sikap proaktifnya. Anggapan ini kemudian dibantah oleh petinggi-petinggi NU, mereka beralasan hal ini sebagai bentuk pengimbangan terhadap kekuatan PKI. Namun tetap saja secara keseluruhan peranan partai Islam mengalami kemerosotan. Tak ada jabatan menteri penting yang dipercayakan kepada tokoh Islam dalam masa Demokrasi Terpimpin ini. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluruskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan tinggi. Legislasi Islam sebagai ideologi negara dianggap memberi pengaruh negatif terhadap pemerintahan.

Di masa Demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya NASAKOM (Nasionalis, Agamis, dan Komunis), suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasionalis “sekular”, Islam dan Komunis.

Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga unsur politik ini. Namun, dengan adanya upaya ini maka implikasinya, peranan partai mengalami erosi karena, kecuali PKI yang memainkan peranan penting. Keadaan ini menimbulkan

ketegangan antara Islam dan komunisme dan munculnya ketidakpuasan dari pihak Nasionalis Sekuler dan angkatan bersenjata. Kemudian muncul semacam anggapan adanya pengkhianatan Soekarno terhadap Pancasila. Soekarno dianggap berselingkuh. Pancasila ditafsirkan sesuai dengan caranya sendiri. Meskipun dalam Pancasila sendiri, unsur-unsur NASAKOM ini nampak jelas ada di dalamnya. Tetapi dengan mengangkatnya dari sebuah substansi yang ada di dalam menjadi sebuah ideologi yang setara, maka penduaan ini tidak terelakkan. Indonesia harus mengangkat Pancasila sekaligus menjunjung NASAKOM-isme. Slogan-slogan, kemakmuran, kesejahteraan, nasionalisme yang agamis berusaha diserukannya, mungkin untuk mengangkat citranya.⁵

Akhirnya masa kejatuhan kekuasaannya pun tiba. Kondisi negara berkebalikan dengan slogan-slogan Soekarno yang pada waktu itu ia gembar-gemborkan. Dengan inflasi keuangan negara sebesar 600 persen, maka era Soekarno pun berakhir, dengan gagalnya Gerakan 30 September PKI tahun 1965, dimana umat Islam bersama ABRI dan golongan lain bekerjasama menumpasnya.

C. PENUTUP

Ketika kita tinjau apa yang sudah di sampaikan dalam artikel di atas dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin merupakan dua masa besar yang terdapat dalam suatu Masa yang sering kita sebut sebagai Masa Orde Lama, dimana Soekarno bertindak sebagai kepala negara.

Pada Masa Orde Lama, Soekarno sebagai Presiden RI yang pertama, membawa semangat *nation and character building* dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di seluruh pelosok Tanah Air didirikan sekolah dan anak-anak dicari untuk disekolahkan tanpa bayar.

⁵. Dedi Supriyadi. *Sejarah Peradaban Islam*. (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2008), h.75

D. DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S. *sekolah dasar, pergulatan mengejar ketertinggalan*, (Solo: Wijatri)
- Ari H Gunawan, *Kebijakan-kebijakan pendidikan*, (Jakarta : Rineka cipta, 1995)
- Dedi Supriyadi. *Sejarah Peradaban Islam*. (Bandung : CV.Pustaka Setia, 2008)
- Mustafa dan abdulloh, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- <http://haanadza.blogspot.com/2008/03/pendidikan-islam-pada-masa-orde-lama.html>